



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI BALI
TAHUN 2021



කැනගා ශ්‍රී ඡායාතරාකාකංචි

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

menuju **BALI ERA BARU**

Alamat : Jln Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp. (0361) 224671, Fax. (0361) 243576

Email: biroapbj@baliprov.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan perlunya penyempurnaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali pada tahun 2021 ini menunjukkan tingkat capaian yang baik dimana capaian untuk tiga tujuan strategis dan tiga sasaran strategis telah memenuhi sasaran yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 111,28 persen. Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021 ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

Bali , 3 Januari 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya	4
1.5.1 Kondisi Sumber Daya Manusia	4
1.5.2 Sarana dan Prasarana Kerja	6
1.6 Sistematika LkjIP	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Strategi dan Kebijakan	8
2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	8
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2021	9
2.4 Instrumen Pendukung	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	13
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
3.2.1 Evaluasi	15
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	17
3.3 Akuntabilitas Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah pegawai di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali	5
Tabel 1.2 : Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.3 : Komposisi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.....	5
Tabel 1.4 : Rekapitulasi Jumlah Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Per 31 Desember 2021	6
Tabel 1.5 : Data Aset	6
Tabel 2.1 : Strategi dan Kebijakan	8
Tabel 2.2 : Program dan Anggaran	8
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahun 2021.....	9
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021	14
Tabel 3.3 : Evaluasi Kinerja Biro PBJ Tahun 2021	15
Tabel 3.4 : Daftar Dokumen yang perlu dioptimalkan	16
Tabel 3.5 : Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	17
Tabel 3.6 : Data Jumlah Permohonan Paket Masuk dan Selesai diproses pada Tahun Anggaran 2021	17
Tabel 3.7 : Prosentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat kualitas dan waktu	18
Tabel 3.8 : Prosentase kinerja pengadaan barang/jasa	19
Tabel 3.9 : Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pengadaan.....	19
Tabel 3.10 : Kualitas Penawaran Pengadaan.....	19
Tabel 3.11 : Persentase Penghematan Penggunaan APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa	20
Tabel 3.12 : Efisiensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	20
Tabel 3.13 : Jumlah informasi komoditas proses e-katalog lokal	21
Tabel 3.14 : Jumlah ketersediaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan	21
Tabel 3.15 : Prosentase pengaduan dan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa yang dapat difasilitasi/diselesaikan	21
Tabel 3.16 : Jumlah SOP proses bisnis Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi	22
Tabel 3.17 : Prosentase pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat kompetensi	22
Tabel 3.18 : Indeks peningkatan level tingkat Kematangan UKPBJ	22
Tabel 3.19 : Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> Pengadaan Barang/Jasa Internal dan Eksternal	23
Tabel 3.20 : Persentase Pemanfaatan SPSE Secara Penuh	24
Tabel 3.21 : Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi	24
Tabel 3.22 : Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Level Kematangan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	24
Tabel 3.23 : Realisasi Belanja Langsung menurut Sasaran dan Indikator tahun 2021	30
Tabel 4.1 : Capaian Rencana Strategis Tahun 2021	31



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
Gambar	1.1 : Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali	4
	2.1 : Gambar Tampilan Halamam Muka SPSE	10
	2.2 : Aplikasi SiAngsa	10
	2.3 : Aplikasi SiBaper	11
	2.4 : Aplikasi Siput	11
	2.5 : Aplikasi Arca	12
	3.1 : Penghargaan Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan	26
	3.2 : Capaian Nilai MCP	28
	3.3 : Capaian Stranas PK	28
	3.4 : Tingkat Kematangan UKPBJ	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Mendorong Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahan evaluasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali mempunyai fungsi penunjang tercapainya RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan visi Gubernur Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana*".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi pembangunan, misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah misi ke 22, yaitu :

"Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah".

Untuk melaksanakan Visi misi tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali melaksanakan 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan kegiatan Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang Renstra tahun 2020 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 serta DPA TA 2020 selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

1.2 Dasar Hukum

LKjIP disusun berdasarkan:

- a. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
- d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan Struktur Organisasi tersebut diatas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai memiliki tugas dan fungsi:

- a) menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
- b) merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- c) mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d) menilai prestasi kerja bawahan;
- e) mengkoordinasikan para Kepala Bagian;
- f) memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- g) merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- h) menganalisa data penyusunan rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang;
- i) memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- j) melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

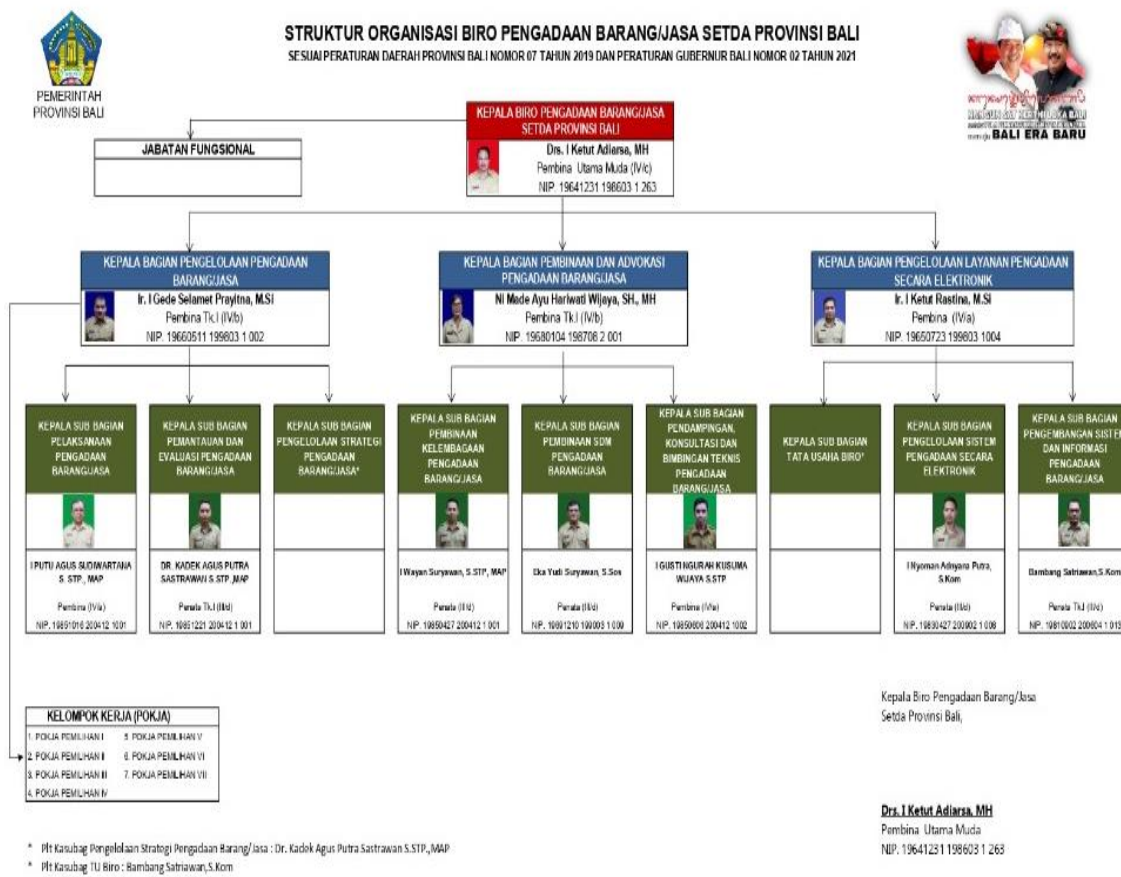
- k) melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa serta melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- l) membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan;
- m) menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota pokja pemilihan;
- n) menetapkan staf pendukung/teknis pengelolaan pengadaan/pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan kebutuhan;
- o) menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/perangkat daerah atas permintaan PA/KPA;
- p) merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- q) merumuskan kebijakan dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- r) merumuskan kebijakan dalam pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- s) merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- t) mengkoordinir pelaksanaan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- u) menyiapkan bahan dan data rumusan Indikator Kinerja Sasaran, Rencana Strategis Setda, Penetapan Kinerja, Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro;
- v) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

1.4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. Bagian-bagian di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibagi lagi menjadi Sub Bagian dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 1.1



Biro Pengadaan Barang/Jasa, yang membawahi:

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

1.5.Sumber Daya

1.5.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia merupakan unsur yang terpenting didalam organisasi, dan kondisi SDM di Biro Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah keseluruhan sebanyak 80 orang berdasarkan status golongan dan jabatan sebagai berikut:



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tabel 1.1

Jumlah pegawai di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	3 orang
3	Pejabat Eselon IV	7 orang
4	Pelaksana	19 orang
5	Fungsional PPBJ	14 orang
6	CPNS	21 orang
7	Tenaga Honorer	-
8	Tenaga Harian	-
9	Tenaga Kontrak	15 orang
Jumlah		80 orang

Sumber :Sub bagian Tata Usaha Biro PBJ Setda Provinsi Bali, Tahun 2021

Tabel 1.2

Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	S2	2	13,5
2	S1	11	73
3	D4	-	-
4	D3	-	-
5	SLTA	2	13,5
6	SD	-	-
Jumlah		15	100

Sumber :Sub bagian Tata Usaha Biro PBJ Setda Provinsi Bali, Tahun 2021

Tabel 1.3

Komposisi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

No	Pokja	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Pokja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah	21	100
Jumlah		21	100

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro PBJ Setda Provinsi Bali, Tahun 2020

Jumlah pegawai per bagian sebagai berikut:

- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa : 36 Orang
- Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik : 28 Orang
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa : 16 Orang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa
Per 31 Desember 2021

GOL	LAKI-LAKI								PEREMPUAN							
	S3	S2	S1	D3/SM	SLTA	SMP	SD	JML	S3	S2	S1	D3/SM	SLTA	SMP	SD	JML
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	2
IV/a	-	3	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
JML GOL IV	-	6	2	-	-	-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	2
III/d	1	6	3	-	-	-	-	10	-	3	3	-	-	-	-	6
III/c	-	1	4	-	-	-	-	5	-	1	2	-	-	-	-	3
III/b	-	2	2	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1
III/a	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	9	-	-	-	-	9
JML GOL III	1	9	23	-	-	-	-	33	-	4	15	-	-	-	-	19
II/d	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML GOL II	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gol I c	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JML TOTAL								44								21

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJ Setda Provinsi Bali, Tahun 2021

1.5.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Berdasarkan Buku Inventaris Tahun 2021 (audited), dapat diperoleh data aset sebagai berikut. Jumlah barang milik daerah yang ada di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dengan total nilai Rp. 7.026.262.306,30 dalam kondisi baik masih dapat dipergunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Aset

Aset	Saldo Awal (Posisi per 1 Januari 2021)		Mutasi dari Januari s/d Desember 2021		
	Volume	Nilai (Rp)	Bertambah	berkurang	Saldo per 30 Desember 2020
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan mesin	635	6.191.737.483,20	2.218.513.595	1.743.152.771,90	6.667.098.306,30
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jalan, Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	-	-	-
Aset tak berwujud	2	253.469.000	105.695.000	-	359.164.000
Total	637	6.445.206.483,20	2.324.208.595	1.743.152.771,90	7.026.262.306,30



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

I.6. Sistematika LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Lampiran IV Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	1. Meningkatkan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, kualitas, harga dan penyedia serta pengembangan katalog lokal dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas.
	2. Meningkatkan fungsi pembinaan dan advokasi untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penguatan kelembagaan dan pemenuhan serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan.
	3. Meningkatkan fungsi pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui pemenuhan standar LPSE, dan pengembangan manajemen informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.

2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.2
Program dan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran APBD (Rp)	Pagu Anggaran APBDP (Rp)
1	2	3	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	12.898.134.891	11.757.626.801
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar		
		Pengadaan Belanja Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Denpasar		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Denpasar		
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	7.742.061.400	6.841.707.259
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar		



2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	- Meningkatnya kinerja pengelolaan pengadaan barang/jasa	- Persentase kinerja penyelesaian pengadaan barang/jasa	100%
2	- Meningkatnya kapasitas lembaga pengadaan barang/jasa	- Peningkatan level kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	implementasi dokumen bukti dukung tingkat kematangan lembaga pengadaan barang/jasa Level 3 (Proaktif) dan pemenuhan dokumen Level 4 (Strategis) yang sudah tercapai 100 %
3	- Indek pelayanan pengadaan barang/jasa	- Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> petugas pengadaan barang /jasa	Baik

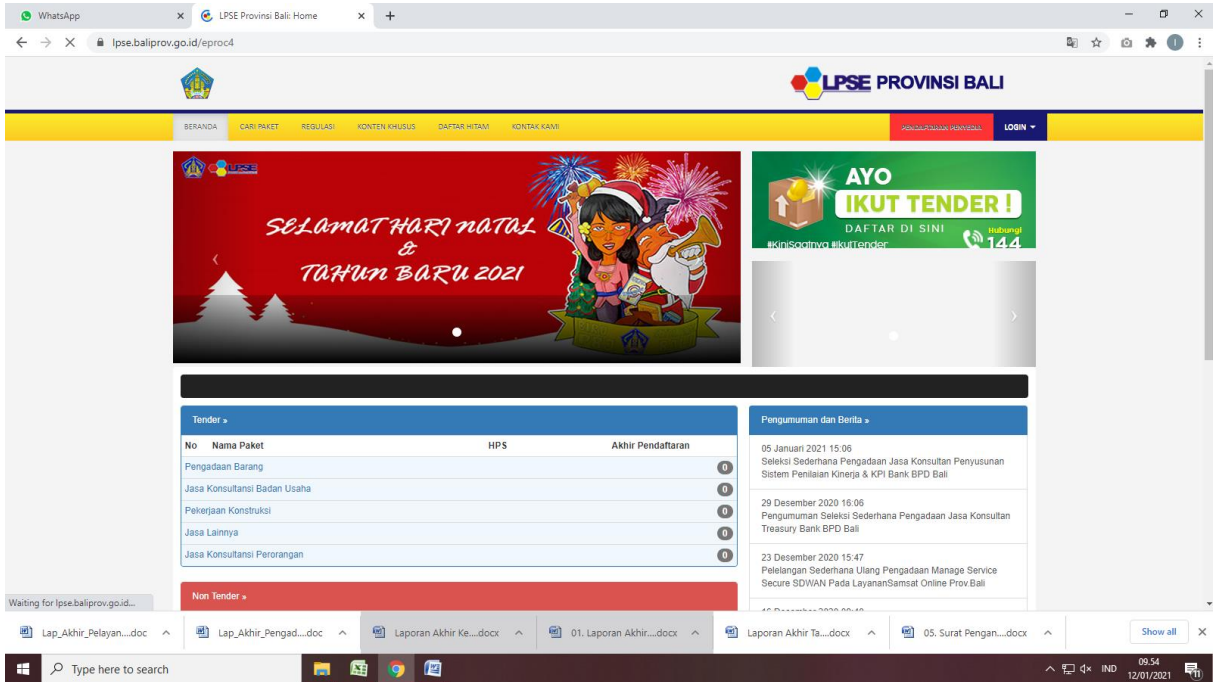
2.4 Instrumen Pendukung

Dalam merealisasikan program/kegiatannya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan perangkat pendukung yang diharapkan dapat membantu mencapai sasaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, untuk mendukung akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi publik.

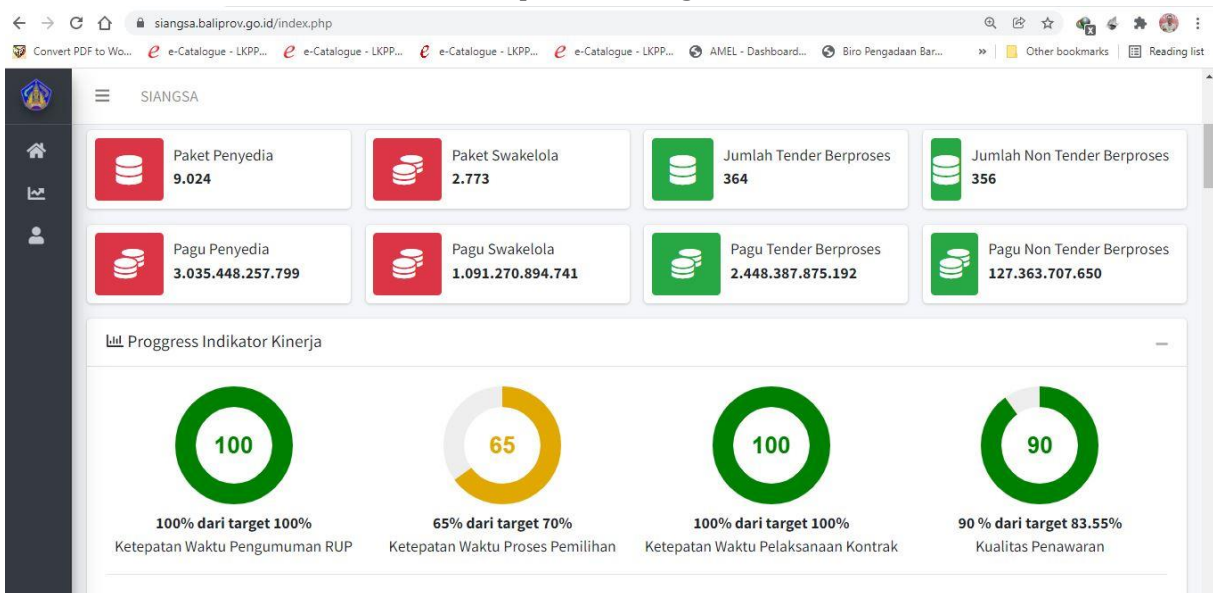
Untuk maksud efisien dan efektif dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali telah dilengkapi instrument pendukung antara lain Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SiAngsa), Sistem Informasi Barang Persediaan (SiBaper), Sistem Informasi RUP Terinput (Siput), dan Aplikasi Rekap Catalog (Arca).



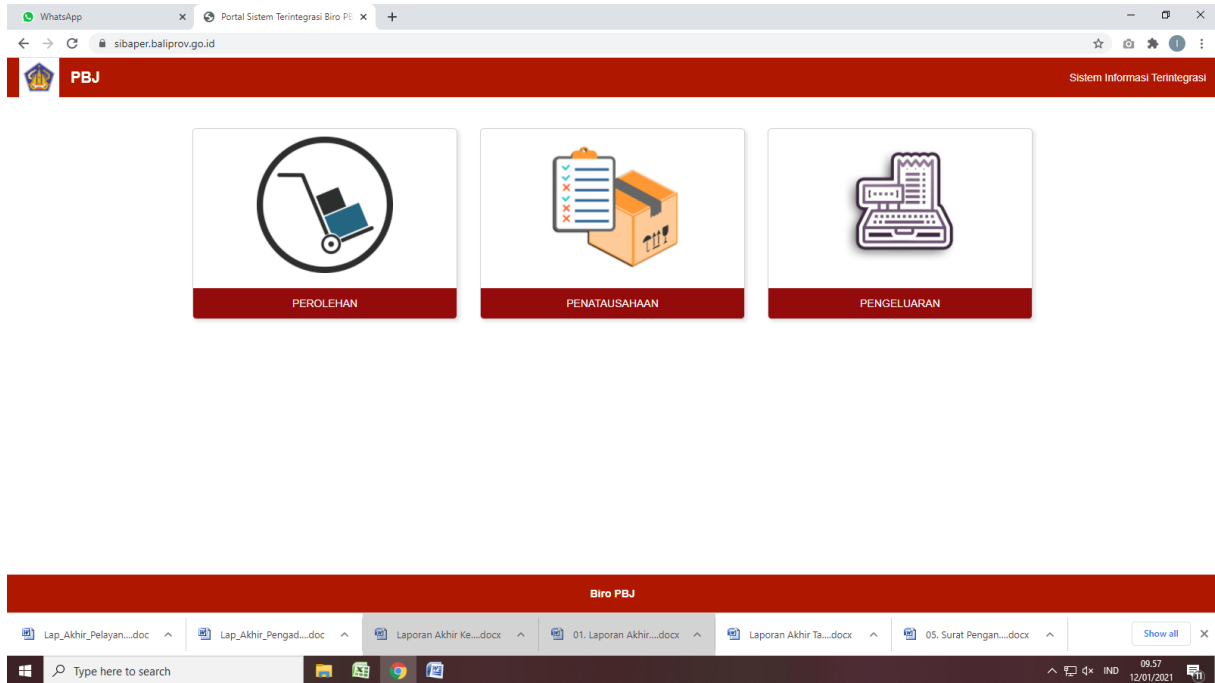
Gambar 2.1
Gambar Tampilan Halaman Muka SPSE



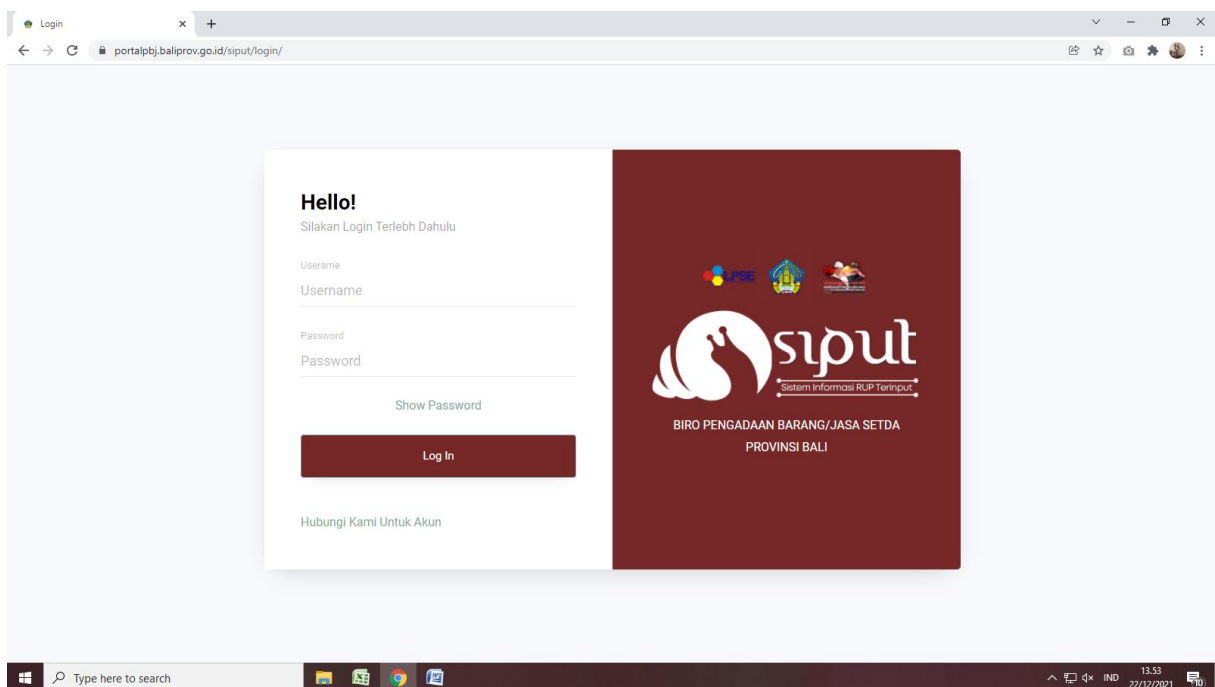
Gambar 2.2
Aplikasi SiAngsa



Gambar 2.3
Gambar Tampilan Halaman Muka SiBaper



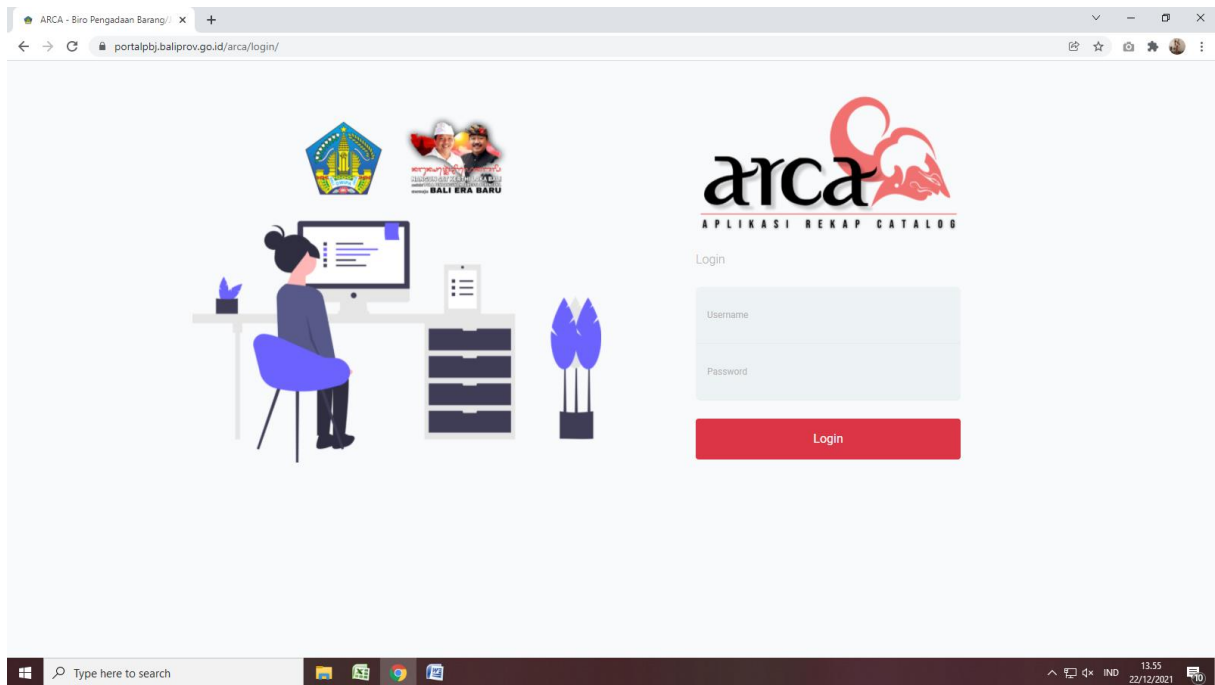
Gambar 2.4
Gambar Tampilan Halaman Muka Siput



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Gambar 2.5
Gambar Tampilan Halaman Muka Arca



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	A
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	B
3.	$66 \leq 75$	Sedang	C
4.	$51 \leq 65$	Rendah	D
5.	≤ 50	Sangat Rendah	E

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA	KODE
1.	Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan value for money	Persentase rata-rata kinerja pengadaan barang/jasa (tepat waktu, biaya dan kualitas)	%	85	92,08	108,33%	Sangat Baik	A
2.	Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan tingkat kematangan kelembagaan	Peningkatan level kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	Indeks	Level 3	Level 3	100,00%	Sangat Baik	A
3.	Terwujudnya Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terintegrasi	Indeks kepuasan stakeholder pengadaan barang /jasa	Indeks	3,5	3,78	108%	Sangat Baik	A
		Persentase pemanfaatan SPSE secara penuh	%	90	95,7	106,33%	Sangat Baik	A



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Evaluasi

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Evaluasi Kinerja Biro PBJ Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang menghasilkan value for money	1.1	Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	(%)	100	92,08	94,25
		1.2	Prosentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat kualitas dan waktu	(%)	70	56,04	80,57
		1.3	Prosentase kinerja pengadaan barang/jasa	(%)	100	95,88	97,96
		1.4	Partisipasi penyedia dalam proses pengadaan	Pelaku usaha/paket	6	6,92	115,33
		1.5	Kualitas penawaran pengadaan	(%)	70	60,99	87,13
		1.6	Prosentase penghematan penggunaan APBD dalam pengadaan barang/jasa	(%)	10	21,05	210,5
		1.7	Jumlah informasi komoditas proses e-katalog lokal	Dokumen	5	9	180
		1.8	Jumlah ketersediaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan	Roda 4	5	5	100
				Roda 2	-	-	-
Total rata-rata capaian sasaran 1						120,72	
2	Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan tingkat kematangan	2.1	Prosentase pengaduan dan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa yang dapat difasilitasi/diselesaikan	(%)	100	100	100



	kelembagaan	2.2	Jumlah SOP proses bisnis pengadaan barang/jasa yang terintegrasi				
		2.3	Prosentase pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat kompetensi	(%)	80	100	125
		2.4	Indeks peningkatan level tingkat kematangan UKPBJ	Indeks	Level 3	Level 3	100
		Rata-rata capaian sasaran 2					
3	Terwujudnya Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terintegrasi	3.1	Indeks kepuasan stakeholder pengadaan barang /jasa	Indeks	3,5	3,78	108
		3.2	Persentase pemanfaatan SPSE secara penuh	(%)	90	95,7	106,33
		3.3	Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi	dokumen	12	12	100
		Rata-rata capaian sasaran 3					
TOTAL PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 1 S/D 3							111,28

Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 111,28 persen. Indikator kinerja yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

a. Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang menghasilkan value for money

Pada sub indikator Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terealisasi 92,08 % dari target 100 %, dikarenakan terdapat beberapa paket pekerjaan yang batal diproses melalui Biro Pokja Pemilihan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dan terdapat paket pekerjaan yang terkena Rasionalisasi dalam rangka penanganan COVID-19.

b. Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan tingkat kematangan kelembagaan, secara umum sudah tercapai sesuai target level 3 (proaktif), akan tetapi masih memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap beberapa dokumen bukti dukung diantaranya :

Tabel 3.4

Variabel	Dokumen yang perlu dioptimalkan
Variabel Manajemen penyedia	- dokumen Vendor Analisis (analisis ketersediaan, analisis kinerja dan pemetaan penyedia)
Variabel	- indentifikasi risiko di tingkat pengelola risiko (PA dan PPK)



Manajemen risiko	di OPD) - Laporan Pemantauan dan Pengendalian Risiko
Pengorganisasian	- Dokumen Analisa Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis) yang memuat rencana keterlibatan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan peran UKPBJ dalam berkolaborasi dengan stakeholder.

- c. **Terwujudnya sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik yang transparan, akuntabel dan terintegrasi**

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali berupaya melaksanakan amanat tugas penunjang pelaksanaan Visi, Misi Pemerintah daerah dibidang pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian kinerja tujuan strategis tahun 2021 sebagaimana diuraikan sbb :

- a. **Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang menghasilkan value for money**

Tabel 3.5

Indikator 1.1. Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	90,67	100	100	100	92,08	100	94,25

Tabel 3.6

Data Jumlah Permohonan Paket Masuk dan Selesai diproses pada Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS PENGADAAN	Data Paket sesuai RUP		Paket yang diproses melalui Pokja Pemilihan			
		JML PKT	PAGU (RP)	PKT MSK	PKT SELES AI	NILAI KONTRAK	Presenta se Paket diproses (%)
1	2	3	4	6	7	8	9
1	BARANG	51	160.732.625.583	47	44	134.091.969.783,09	86,27
2	KONSTRUKSI	92	955.999.784.957	91	88	735.635.056.625,86	95,65
3	KONSULTANSI	45	60.925.713.368	45	44	45.004.685.742,19	97,78
4	JASA LAINNYA	14	14.925.670.563	11	10	9.849.747.752,60	71,43
	JUMLAH	275	1.192.583.794.471	194	186	924.581.459.903,74	92,08

Sasaran kinerja untuk indikator 1.1. di tahun 2021 adalah 100 % sedangkan realisasinya sebesar 92,08 %, sehingga capaian kerjanya sebesar 92,08 %, capaian kinerja sebesar 92,08 % merupakan perbandingan Paket yang masuk sampai dengan akhir tahun sebanyak 202 paket, dengan status selesai sebanyak 186 paket dan 16 ditunda karena untuk penanganan Covid-19 .



Tabel 3.7

Indikator 1.2.							
Prosentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat kualitas dan waktu							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	20,18	70	50,04	70	56,04	100	42,08

Indikator ini merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja pengadaan untuk mewujudkan tujuan pengadaan yang menghasilkan *value for money* terkait dengan ketetapan waktu proses pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan. Indikator ini baru ada setelah perbaikan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali 2020 – 2023.

Indikator ketepatan waktu pemilihan tercapai dalam kategori cukup namun belum optimal sesuai dengan target kinerja pada Tahun 2021, dikarenakan beberapa kendala terkait dengan kesiapan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pemilihan.

Tabel 3.8

Indikator 1.3							
Prosentase kinerja pengadaan barang/jasa							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra Capaian
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	98	100	100	100	95,88	100	97,96

Indikator ini merupakan presentasi dari proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diproses oleh pokja pemilihan. Pencapaian kinerja pengadaan barang/jasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam melakukan manajemen pengadaan barang/jasa sehingga paket pekerjaan yang diproses oleh pokja pemilihan bisa tepat dengan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan.

Sampai akhir periode indikator ini dapat tercapai dengan baik, sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100 %, sementara terealisasi sebesar 95,88 %. Hal ini terjadi karena beberapa paket pekerjaan yang telah diproses oleh Pokja pemilihan dilakukan pembatalan oleh perangkat daerah karena terkena rasionalisasi penanganan covid-19.



Tabel 3.9

Indikator 1.4							
Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pengadaan							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra Capaian
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
Pelaku usaha /paket	5,28	5,3	6,71	6	6,92	7	6,30

Indikator ini merupakan salah satu langkah untuk perbaikan kinerja pengadaan dari sisi kualitas dengan melihat tingkat penyedia yang turut berpartisipasi mengikuti proses pemilihan pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali menergetkan bahwa Tahun 2021 setidaknya ada 6 (enam) penyedia yang turut berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi. Realisasinya rata-rata penawaran yang masuk untuk satu paket pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 6,92 %, realisasinya melampaui target.

Realisasi yang baik ini tentu tidak lepas dari semakin transparansinya proses pengadaan melalui SPSE, dokumen pemilihan sesuai standar, strategi pengadaan yang ditetapkan, sehingga penyedia semakin mudah dan tertarik untuk berpartisipasi mengikuti proses pengadaan barang/jada pada Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali berperan aktif melakukan pendampingan dalam proses perencanaan, reuiu dokumen pemilihan dan mengembangkan/menjaga keamanan SPSE.

Tabel 3.10

Indikator 1.5							
Kualitas Penawaran Pengadaan							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra Capaian
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	80,44	70	83,55	70	60,99	100	74,99

Indikator ini merupakan salah satu langkah awal untuk perbaikan kinerja pengadaan dari sisi kualitas dengan melihat persentase rata-rata jumlah penawaran yang memenuhi syarat dengan jumlah penawaran yang masuk. Selanjutnya dapat dijadikan dasar pembinaan dan perbaikan kebijakan pelaku pengadaan seperti PA/KPA, PPK, Pokja pemilihan dan para pelaku usaha/peserta tender/seleksi.

Dari target 70 persen terealisasi sebesar 60,99 %, realisasi baik diatas target, berarti kualitas penawaran ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi terdapat 16,45 % penawaran yang dinyatakan tidak memenuhi syarat paling banyak pada paket pengadaan barang dan kontruksi, sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.



Tabel 3.11

Indikator 1.6							
Prosentase Penghematan Penggunaan APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	18,89	7	19,45	10	21,05	10	19,79

Target sasaran Indikator 1.6 di tahun 2021 adalah sebanyak 10 persen terealisasi 21,05 persen sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 19,79 persen sehingga target tahun 2021 sudah melebihi target sasaran akhir Renstra.

Tabel 3.12**Efisiensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai Pagu – Nilai Kontrak)**

No.	Jenis Pengadaan	Paket Masuk	Pagu Paket Masuk (Rp.)	Paket Selesai	Nilai Kontrak (Rp.)	Efisiensi	%
1	Barang	44	155.350.284.225,00	44	134.091.969.783,09	21.258.314.441,91	13,23
2	Konstruksi	88	952.048.350.957,00	88	735.635.056.625,86	216.413.294.331,14	22,64
3	Konsultansi	44	60.423.438.368,00	44	45.004.685.742,19	15.418.752.625,81	25,31
4	Jasa Lainnya	10	11.670.670.118,00	10	9.849.747.752,60	1.820.922.365,40	12,20
	Total	186	1.179.492.743.668,00	186	924.581.459.903,74	254.911.283.764,26	21,37

Target sasaran Indikator 1.6 di tahun 2021 adalah sebesar 10 persen, sedangkan realisasinya sebesar 21,37 persen (Rp. 254.911.238.764,26). Penghematan terbesar terlihat pada paket pekerjaan pengadaan konsultansi rata-rata sebesar 25,31% atau Rp.15.418.752.628,81, disusul pekerjaan Konstruksi sebesar 22,64% atau Rp.216.413.294.331,14.

Semakin mudahnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan semakin meningkatnya kompetensi Pokja Pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan, serta kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan HPS, maka akan berpengaruh terhadap persentase penghematan penggunaan APBD dalam pengadaan barang/jasa akan semakin besar dan belanja daerah akan semakin efisien untuk mengoptimalkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”.



Tabel 3.13

Indikator 1.7							
Jumlah informasi komoditas proses e-katalog lokal							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra Capaian
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	0	2	2	5	9	20	11

Target sasaran Indikator ini di tahun 2021 adalah sebesar 5 produk, sedangkan realisasinya dalam proses katalog sebesar 9 produk yang telah tayang pada aplikasi e-katalog.

Tabel 3.14

Indikator 1.8							
Jumlah ketersediaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra Capaian
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
Unit	Roda 4: 208	Roda 4 : 8	Roda 4 : 8	Roda 4 : 5	Roda 4 : 5	Roda 4 : 327	Roda 4 : 221

Target sasaran Indikator ini di tahun 2021 adalah kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit (100%) sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 221 unit sehingga kekurangan target renstra sebanyak 106 unit.

b. Meningkatnya Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tingkat Kematangan Kelembagaan

Tabel 3.15

Indikator 2.1							
Prosentase pengaduan dan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa yang dapat difasilitasi/diselesaikan							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	100	100	100	100	100	100	100

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi/pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa tahun 2021, terealisasi 100 %, dari target 100 %. Permasalahan hukum pengadaan barang/jasa di tahun 2021 berupa : 9 sanggahan, 2 permasalahan hukum, 4 pendampingan/konsultasi Tim Clearing House dan 6 permohonan pendampingan/konsultasi pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa. Semua pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi/pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa dimaksud telah terfasilitasi proses pendampingan.



Tabel 3.16

Indikator 2.2					
Jumlah SOP proses bisnis Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi					
SATUAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
	2020	2021		AKHIR RENSTRA 2023	
Dokumen	4	2	2	10	6

Target sasaran Indikator 2.4 di tahun 2021 adalah buku SOP/juklak juknis sebanyak 2 buku, terealisasi 2 buku (100%) yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tentang Alokasi Belanja Pemerintah Untuk Produk UMKM dan Koperasi sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 6 buku sehingga kekurangan target renstra sebanyak 4 buku.

Pada tahun 2021 terdapat 12 kali Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 adalah 12 kali Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (100%).

Tabel 3.17

Indikator 2.3							
Prosentase pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat kompetensi							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	75	70	100	80	100	100	91,67

Pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan SDM PBJ dan Personil UKPBJ tahun 2021, terealisasi 100 %, dari target 80 %. sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 91,67 %

Tabel 3.18

Indikator 2.4							
Indeks peningkatan level tingkat Kematangan UKPBJ							
Satuan	2019	2020		2021		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
Indeks	3	3	3	3	3	3	3

Target sasaran Indikator 2.1 di tahun 2021 adalah implementasi dokumen bukti dukung tingkat kematangan lembaga pengadaan barang/jasa Level 3 (Proaktif) dan pemenuhan dokumen Level 4 (Strategis) yang sudah tercapai 100 % dokumen bukti dukung sudah terpenuhi dengan hasil terverifikasi Level 4 (Strategis) sebanyak 6 (enam) variable yaitu



Variabel Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Pengorganisasian Kelembagaan, Tugas/Fungsi Lembaga, Perencanaan SDM Pengadaan dan Pengembangan SDM Pengadaan sedangkan 3 variabel masih dalam proses verifikasi (Manajemen Pengadaan, Manajemen Risiko dan Sistem Informasi).

Pengisian Penilaian Mandiri - UKPBJ PROVINSI BALI Home · Pengisian Penilaian Mandiri

CSV Excel PDF Print Search:

No	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
1)	Proses	Manajemen Pengadaan	Strategis	Menunggu Verifikasi	Lihat
2)	Proses	Manajemen Penyedia	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
3)	Proses	Manajemen Kinerja	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
4)	Proses	Manajemen Risiko	Strategis	Menunggu Verifikasi	Lihat
5)	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
6)	Kelembagaan	Tugas/Fungsi Kelembagaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
7)	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
8)	SDM	Pengembangan SDM Pengadaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
9)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Strategis	Menunggu Verifikasi	Lihat

Showing 1 to 9 of 9 entries

Tingkat Kematangan UKPBJ :

Level 1 (Inisiasi)	Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih adhoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
Level 2 (Esensi)	Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses pengadaan barang/jasa yang aktif
Level 3 (Proaktif)	Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
Level 4 (Strategis)	Proses/pola pikir pengelolaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
Level 5 (Unggul)	Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya

c. Terwujudnya Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Transparan, Akuntabel, dan Terintegrasi

Tabel 3.19

Indikator 3.1					
Indeks Penilaian Tingkat Kepuasan Stakeholder Intern dan Ekstern					
SATUAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
	2020	2021		AKHIR RENSTRA 2023	
Indeks	3,58	3,5	3,78	3,5	3,68

Target sasaran Indikator 3.1 di tahun 2021 adalah Indeks kepuasan *stakeholder* adalah 3,5 (baik) terealisasi indeks 3,78 (baik) sedangkan capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak indeks 3,68 (baik).



Tabel 3.20

Indikator 3.2					
Persentase Pemanfaatan SPSE Secara Penuh					
SATUAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
	2020	2021		AKHIR RENSTRA 2023	
(%) persen	90	90	95,7	95	92,85

Target sasaran Indikator 3.2 di tahun 2021 adalah 90 persen terealisasi 95,7 persen. Capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 92,85 persen.

Tabel 3.21

Indikator 3.3					
Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi					
SATUAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN	SASARAN	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
	2020	2021		AKHIR RENSTRA 2023	
Dokumen	12	12	12	12	12

Target sasaran Indikator 3.3 di tahun 2021 adalah 12 dokumen terealisasi 12 dokumen (100%). Capaian akhir renstra sampai dengan 2021 sebanyak 12 dokumen berupa laporan Moneyev Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa setiap bulan.

d. Analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

Tabel 3.22

Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Level Kematangan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa

No. Urt.	Kegiatan	Anggaran Sebelum Refocusing (Rp)	Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.248.000	857.500	68,71%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.322.248.121	9.681.458.831	8.699.232.556	89,85%



No. Urt.	Kegiatan	Anggaran Sebelum Refocusing (Rp)	Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.578.370.370	1.445.969.970	1.161.776.365	80,35%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.800.000	295.800.000	258.438.400	87,37%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	699.716.400	333.150.000	223.194.618	67,00%
	JUMLAH			10.343.499.439	78,65%



e. Informasi Tambahan

Prestasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 meliputi :

1. Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan

Gambar 3.1



Nomor: 000748/DT.TOT.02/PusdiklatPBJ/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penerima Sertifikat Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan bahwa:

I Ketut Adiarsa

Sebagai

**Fasilitator
Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan**

Jakarta, 7 April 2021

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa



Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M. Si.
NIP 19671208 199203 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KODE ETIK FASILITATOR PBJ

Etika Dasar

- Menjunjung tinggi nilai – nilai integritas
- Berperilaku sesuai Peraturan yang telah ditetapkan.

Etika Antara Fasilitator PBJ dengan LKPP

- Menjaga kehormatan LKPP
- Dilarang mengatasnamakan LKPP di luar lingkup penugasannya
- Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Pusdiklat PBJ
- Ikut serta mengembangkan materi pelatihan
- Menerapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ

Etika Antara Fasilitator PBJ dengan Fasilitator PBJ

- Melakukan koordinasi dengan Fasilitator PBJ lainnya dalam proses pembelajaran
- Menjaga hubungan baik sesama Fasilitator PBJ
- Berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesama Fasilitator PBJ

Etika Antara Fasilitator PBJ dengan LPPBJ

- Mengajarkan Program Pelatihan PBJ pada LPPBJ yang telah terdaftar atau terakreditasi oleh Pusdiklat PBJ
- Berkoordinasi dengan LPPBJ dalam rangka penyelenggaraan pelatihan
- Mendorong dan/atau membantu LPPBJ dalam melaksanakan pelatihan sesuai program pelatihan PBJ.
- Turut serta dalam pembinaan dan pengembangan LPPBJ

Etika Antara Fasilitator PBJ dengan Peserta Pelatihan

- Memberikan pelayanan prima dalam proses pembelajaran
- Menjawab pertanyaan peserta sesuai kapasitas dan kompetensinya dalam program Pelatihan yang diajarkan
- Memberikan informasi yang benar mengenai regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
- Tidak menjanjikan kelulusan kepada peserta pelatihan

Jakarta, 7 April 2021

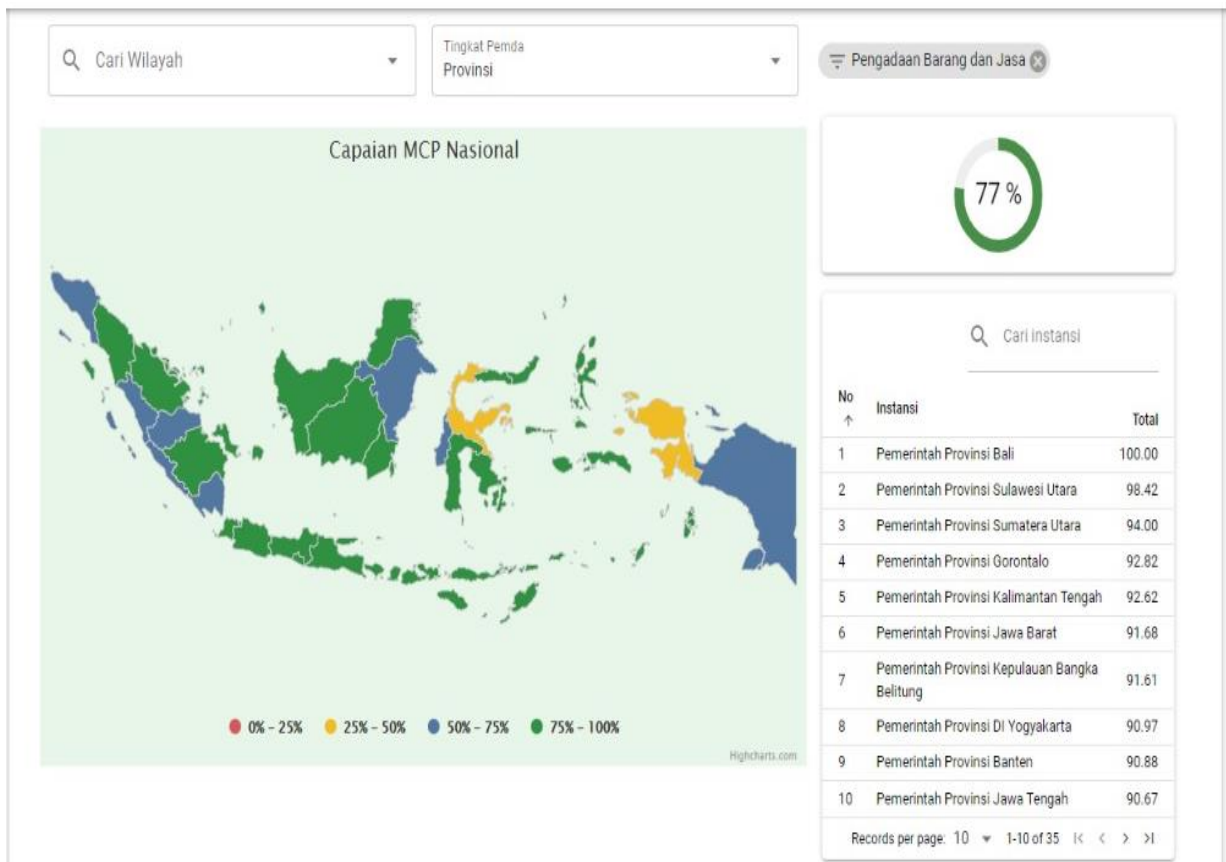
Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa



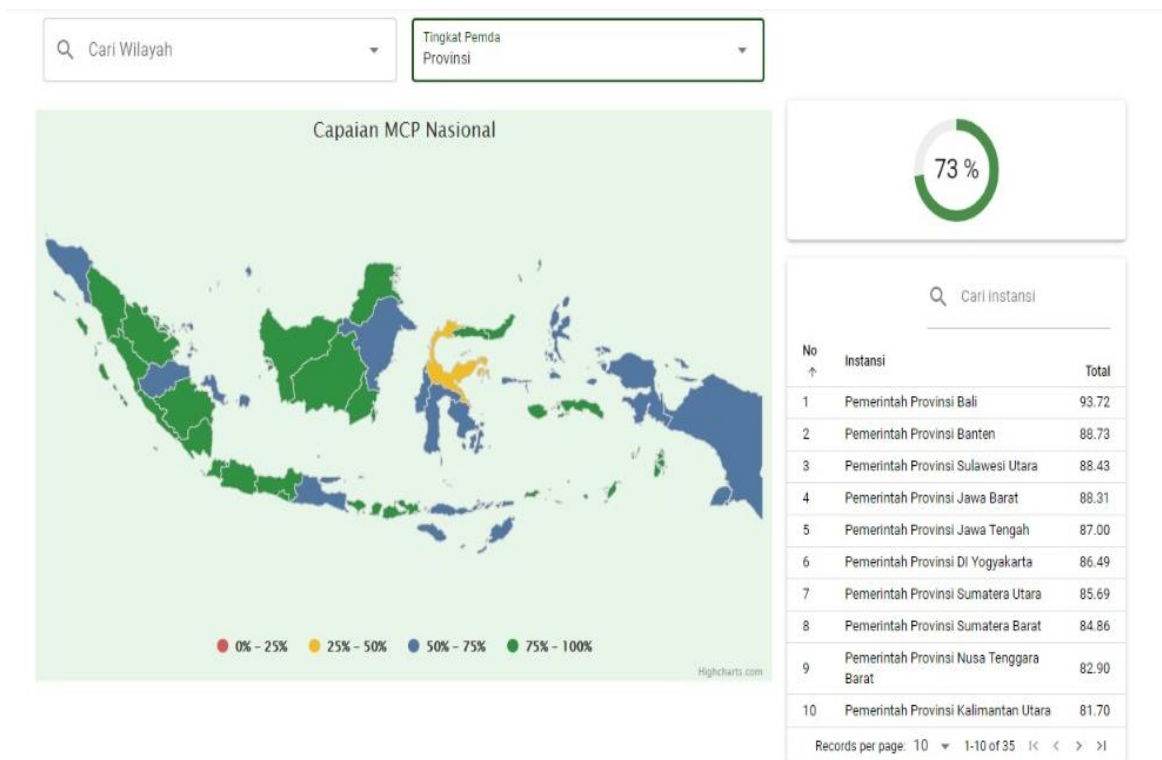
[Signature]
Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M. Si.
NIP 19671208 199203 1 002



2. Capaian Nilai MCP Kategori Pengadaan Tertinggi Secara Nasional dengan Nilai 100
Gambar 3.2



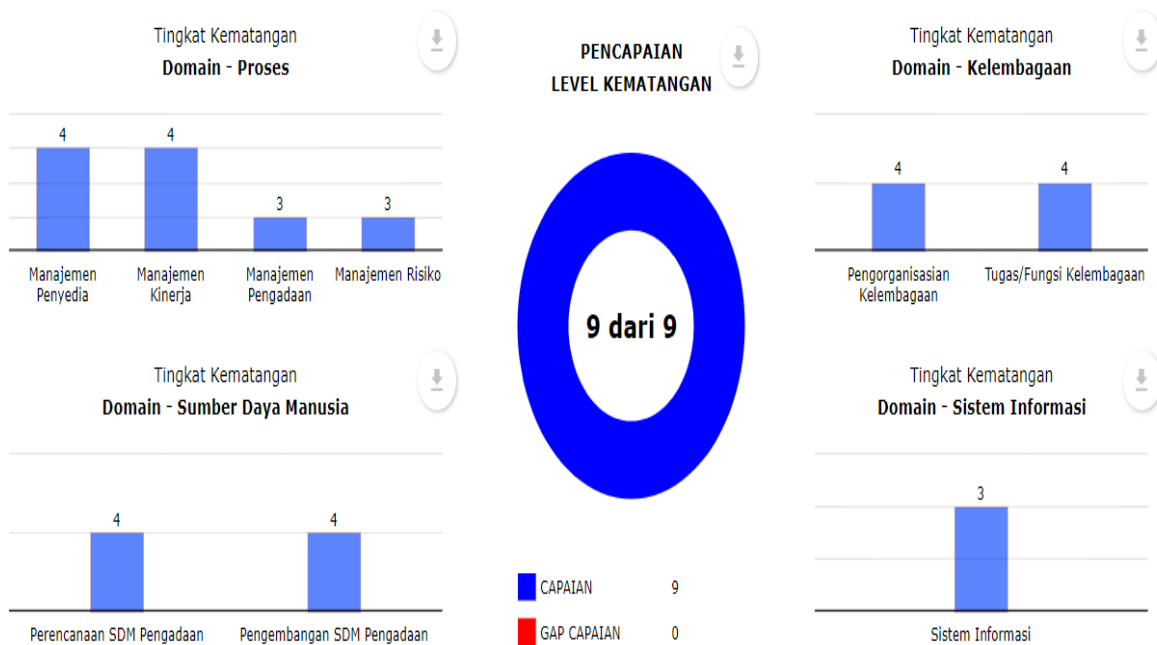
3. Capaian Stranas PK Tertinggi Nasional dengan Nilai 93,72
Gambar 3.3



Gambar 3.4

**Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ
PROVINSI BALI**

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	4	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	4	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	4	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik.	3	4	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	4	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	4	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.599.334.060,- dan terealisasi sebesar Rp.16.504.401.214 atau 88,74 % dan Realisasi Fisik sebesar 99,51%. Realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dan indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Realisasi Belanja Langsung menurut Sasaran dan Indikator tahun 2021.

No. Urt.	Program / Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
	Belanja Langsung			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.	11.757.626.801	10.343.499.439	87,97
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.000	857.500	68,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.681.458.831	8.699.232.556	89,85
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.969.970	1.161.776.365	80,35
4	Pengadaan Belanja Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	295.800.000	258.438.400	80,37
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	333.150.000	223.194.618	67,00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.	6.841.707.259	6.160.901.775	90,05
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.402.756.800	5.753.021.775	89,85
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	289.535.459	263.015.000	90,84
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	149.415.000	144.865.000	96,95
	J U M L A H	18.599.334.060	16.504.401.214	88,74



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang merupakan perubahan dari Renstra Tahun 2020 – 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

1. Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik dengan rata-rata capaian 111,28 persen dengan kinerja anggaran sebesar Rp.16.504.401.214 atau sebesar 88,74 persen.
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa setda Provinsi Bali melalui tugas dan fungsinya pada Tahun 2021 telah berhasil mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa yaitu sebagai efisiensi sebesar 21,37 persen atau Rp. 254.911.283.764,26 berdasarkan perbandingan Pagu dengan nilai kontrak.
3. Dari analisis Rencana Strategis rata-rata sudah bisa dicapai dan masih perlu ditingkatkan pada masa mendatang.

Tabel 4.1
Capaian Rencana Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA	KODE
1.	Meningkatnya penyelesaian pengadaan barang/jasa	Persentase tingkat penyelesaian pengadaan barang/jasa	%	100	92,08	94,25%	Sangat Baik	A



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA	KODE
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga pengadaan barang/jasa	Peningkatan level kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	Indeks	Level 3	Level 3	100,00%	Sangat Baik	A
3.	Indek pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase kepuasan stakeholder pengadaan barang /jasa	%	3,5	3,78	3,68%	Sangat Baik	A

4. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.599.334.060,- dan terealisasi sebesar Rp.16.504.401.214 atau 88,74 % dan realisasi fisik sebesar 99,51%. Realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dan indikator

Rekomendasi :

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dirumuskan saran-saran sebagai berikut

- (1) Melanjutkan upaya implementasi kematangan kelambagaan UKPBJ dapat di tingkatkan dari level 3 (proaktif) menuju level 4 (strategis) atau level 5 (unggul) sehingga Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dapat menjadi role model pusat keunggulan pengadaan (PKP)
- (2) Peningkatan 100 persen *e-Procurement* di perangkat daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Bali melalui penyempurnaan tata kelola pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan komitmen *stakeholder* untuk melaksanakan 100 persen *e-Procurement* dalam pelaksanaan anggaran yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa, terutama bagi Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Bali;
- (3) Melanjutkan proses pengelolaan katalog lokal untuk pengembangan dan pembinaan pelaku usaha lokal dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di daerah untuk beberapa komoditas dan varian yang memenuhi kriteria masuk kedalam katalog lokal dengan berkoordinasi ke LKPP-RI;
- (4) Meningkatkan pembinaan profesionalitas dan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bali, 3 Januari 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR